



Kontrak Cirebon-VOC Tahun 1699: Peran VOC dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Cirebon

Tendi^{1*}

¹ IAIN Syeikh Nurjati, Cirebon

* E-mail: tendy.chaskey@yahoo.co.uk

Citation: Tendi. "Kontrak Cirebon-VOC Tahun 1699: Peran VOC dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Cirebon". *Socio Historica* 2022, Vol. 1, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.15408/sc.v1i2.27596>

Publisher's Note: Socio Historica stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: During the second half of the seventeenth century, the political constellation of Java changed drastically. The dominance of Mataram in Priangan, which was previously strong, was replaced by the superiority of Banten which carried out military expansion to a number of Priangan areas, including Cirebon. However, the domination did not last long because in 1680, the Cirebon princes were more inclined to ally with VOC than Mataram or Banten. After his position was strengthened in Cirebon, the turmoil of disputes which based on the desire for power emerged from within the kraton, and grew even more after the death of Sultan Sĕpuh I in 1697. To maintain the rush en order of the regions under his supervision, VOC helped mediate the conflict and set Contract of August 4, 1699 as a solution to the problem. The Cirebon-VOC contract in 1699 was written manually and still preserved today. Through the contract, VOC regulated the nobility degree of the three Cirebon rulers on the basis of applicable customs and established other rules to eliminate competition as the seed of conflict.

Keywords: Cirebon, kraton Kasĕpuhan, palace conflict, VOC contract, stability.

Abstrak: Sepanjang paruh kedua Abad XVII, konstalasi politik Tanah Jawa berubah secara drastis. Dominasi Mataram di Priangan yang sebelumnya kokoh, berganti dengan kedigdayaan Banten yang melakukan ekspansi militer ke sejumlah daerah Priangan, termasuk di antaranya Cirebon. Namun, dominasi itu tidak berlangsung lama karena memasuki tahun 1680, para pangeran Cirebon lebih condong untuk bersekutu dengan VOC ketimbang Mataram ataupun Banten. Setelah kedudukannya semakin kokoh di Cirebon, gejala perselisihan yang dilandasi oleh keinginan berkuasa justru muncul dari internal istana, dan semakin membesar pasca wafatnya Sultan Sĕpuh I pada 1697. Untuk tetap menjaga rust en orde wilayah yang berada di bawah pengawasannya, VOC turut menengahi konflik dan menetapkan Kontrak 4 Agustus 1699 sebagai solusi permasalahan. Kontrak Cirebon-VOC tahun 1699 ditulis secara manual dan masih tersimpan hingga sekarang. Melalui kontrak itu, VOC mengatur derajat kebangsawanan ketiga penguasa Cirebon dengan dasar adat yang berlaku dan menetapkan aturan lainnya untuk menghilangkan persaingan yang merupakan benih konflik yang terjadi di tengah para penguasa tertinggi Cirebon.

Kata Kunci: Cirebon, keraton Kasĕpuhan, konflik istana, kontrak VOC, stabilitas.

1. Pendahuluan

Cirebon adalah salah satu daerah yang memiliki sejarah Panjang. Sejarahnya dimulai sejak zaman pra-sejarah yang ditandai dengan adanya temuan arkeologis peribadatan kuno di Desa Belawa sampai zaman modern yang berupa rangkaian peristiwa penting yang terjadi hingga saat ini. Pelbagai peradaban muncul, berkembang, dan hancur, terus bergantian tampil dan hilang dalam panggung sejarah. Salah satu peradaban besar yang eksis di Cirebon, adalah peradaban kesultanan-kesultanan Cirebon yang mampu bertahan sejak Abad XV hingga sekarang.

Meskipun nama peradaban kekuasaan pada kurun waktu ini terus berubah menyesuaikan gelar penguasanya, mulai dari nama Susuhunan dengan pemimpinnya yang bergelar Sunan, Kepanembahan dengan tampuk kekuasaan yang berada di tangan seorang penguasa bergelar Panembahan, hingga Kesultanan yang mengikuti gelar pemimpinnya yang notabene adalah bangsawan Cirebon yang memakai gelar Sultan. Karena periodenya yang lebih panjang dan bertahan hingga sekarang, nama “kesultanan” dengan ciri pemimpinnya yang bergelar “sultan” ini tampaknya yang melekat pada Cirebon sehingga secara umum pelbagai kekuasaan tadi hanya dikenal sebagai Kesultanan Cirebon.

Sekalipun banyak yang beranggapan bahwa periode Kesultanan Cirebon telah dimulai sejak kepemimpinan Syarif Hidayatullah, namun pada kenyataannya gelar kepemimpinan “sultan” baru digunakan di Cirebon setelah Pangeran Martawijaya (sebagai Sultan Sěpuh I) dan Pangeran Kartawijaya (sebagai Sultan Anom I) memakainya pada akhir Abad XVII.¹

Dalam kurun waktu kepemimpinan keduanya, Cirebon bertransformasi dari daerah yang semula mandiri menjadi daerah yang berada di bawah pengaruh pihak lain. Mataram, Banten, dan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) bergantian menjadi kekuatan yang mendominasi Cirebon. Meski kedua kekuatan lokal di atas sempat

1. Pada tahun 1677, Kesultanan Cirebon menjadi wilayah yang berada di bawah hegemoni Kesultanan Banten. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa melantik kedua putra Panembahan Girilaya sebagai pemimpin Cirebon dengan gelar kehormatan “sultan”. Saat itu, Pangeran Martawijaya mendapat gelar Sultan Syamsuddin (Sultan Sěpuh), Pangeran Kartawijaya dianugerahi gelar Sultan Kamaruddin (Badruddin; Sultan Anom). Pangeran ketiga, yakni Pangeran Wangsakerta, turut diberi gelar kemudian dengan titel “panembahan”, sehingga sosoknya dikenal sebagai Panembahan Cirebon. Baca lebih lanjut dalam Atja, “Menjelang Penetapan Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Cirebon” (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, 1988), 20.

menguasai Cirebon, pada akhirnya VOC yang memenangkan hegemoni atas daerah pesisir utara Jawa tersebut, melalui sejumlah perjanjian dan kontrak yang disepakati bersama di antara kedua belah pihak. Perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian 7 Januari 1681 adalah surat formal pertama yang disepakati oleh penguasa Cirebon dan pemimpin VOC, serta menjadi gerbang paling awal bagi perusahaan dagang tersebut untuk memasuki tatanan Cirebon dan kemudian menguasainya.² Dengan perjanjian dan kesepakatan itu, Maskapai Dagang asal Belanda tersebut akhirnya sedikit demi sedikit dapat melakukan intervensi terhadap pelbagai bidang kehidupan kesultanan dan masyarakat Cirebon.

Jalinan “persahabatan” yang dibangun antara Cirebon dengan VOC melahirkan sejumlah konsekuensi, yang berbuntut adanya pelbagai kewajiban yang mesti dijalankan oleh Cirebon. Dalam Perjanjian 1681 misalnya, kegiatan pelayaran masyarakat Cirebon yang sebelumnya bebas menjadi dibatasi. Tidak ada yang bisa masuk ke Cirebon dan pergi ke luar daerah itu, kecuali memiliki lisensi atau izin yang berasal dari Kompeni. Tidak hanya itu, tanaman lada Cirebon yang tengah menjadi komoditas penting di pasaran, juga diatur pengelolaan dan penentuan harganya oleh pejabat-pejabat Batavia.³ Pejabat yang dimaksud di sini adalah Gubernur Jenderal VOC dan Dewan Hindia (*Raad van Indië*) di Batavia. Perdagangan yang semula bebas dilakukan penduduk dengan kelompok atau suku bangsa lain pun menjadi terbatas karena hak monopoli atas impor pakaian, kapas, opium, serta ekspor kayu, gula, beras, dan produk lainnya hanya didapatkan oleh VOC. *Bea* atau pajak atas barang-barang impor yang sebelumnya dikenakan oleh kalangan istana terhadap para pedagang yang datang ke Cirebon, sejak perjanjian awal itu, dibebaskan terhadap orang-orang Kompeni.⁴ Guna menjamin berjalannya kesepakatan, VOC menempatkan seorang pejabat Eropa sebagai residen Kompeni di Cirebon. Ia menjadi wakil Kompeni sekaligus pengawas atas ketaatan para pangeran Cirebon terhadap janji yang telah mereka bubuhkan. Kedudukan residen dibantu oleh satu garnisun militer yang kuat, terdiri dari 70 personil pasukan berkebangsaan Eropa. Mereka

2. Tendi, “Surat Perjanjian 7 Januari 1681: Edisi Diplomatik Naskah,” *Jurnal Tamaddun* 8, no. 1 (April 16, 2020): 57, <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/article/view/6315>.

3. Thomas Stamford Raffles, *The History of Java*, trans. Prasetyaningrum Eko, Nuryati Agustin, and Idda Qoryati Mahbubah, 3rd ed. (Yogyakarta: Narasi, 2014), 184.

4. E. C. Godée Molsbergen, *Gedenkboek der gemeente Cheribon, 1906 - 1931: door de stadsgemeente Cheribon uitg. t.g.v. het 25-jarig bestaan der gemeente op 1 April 1931* (Bandung-Cirebon: Nix & Co, 1931), 7.

menempati sebuah benteng yang terdapat di pesisir pantai Cirebon,⁵ dan sebuah pos militer luar yang berlokasi di Indramayu.⁶

Rangkaian perjanjian yang disepakati oleh Cirebon dan VOC membuat pamor dan kedudukan Cirebon semakin menurun dalam pentas sejarah, karena secara politis maupun militer, Kompeni telah menjadikannya sebagai sebuah daerah protektorat yang berada di bawah kewenangannya.⁷ Secara sosio-antropologis, kondisi itu menempatkan ketiga penguasa Cirebon, hanya sebagai perantara atau “*broker*” yang berada di antara kepentingan VOC sebagai *gusti*-nya dan penduduk Cirebon sebagai *kawula*-nya.⁸

Pasca masuknya Kompeni ke tengah struktur politik Cirebon dan menduduki puncak hierarki struktur tersebut, kondisi keamanan wilayah dapat dikelola dengan cukup baik karena pelbagai gangguan keamanan yang terjadi dapat diatasi. Tidak ada gejolak atau peristiwa besar yang mengganggu kedudukan VOC secara berarti, kecuali satu abad setelahnya yang terjadi di bagian barat *Kraton* Cirebon, yakni Peristiwa Perang Kedondong atau dikenal pula sebagai Perang Bagus Rangin. Meskipun demikian, stabilitas keamanan Cirebon sempat terancam akibat adanya letupan-letupan konflik yang muncul di internal istana. Sejumlah bangsawan di lingkaran kekuasaan, merasa memiliki hak dan kompetensi untuk merengkuh tampuk kepemimpinan.

Salah satu konflik istana yang paling awal muncul dan menjadi perhatian VOC adalah konflik antara Pangeran Dipati Anom dan Pangeran Adiwijaya, yang berasal dari Keraton Kasepuhan. Dalam daftar silsilah, diketahui bahwa keduanya adalah putra Sultan Sepuh I Martawijaya. Kelak, Pangeran Dipati Anom menjadi Sultan Sepuh II dengan gelar Sultan Jamaludin dan Pangeran Adiwijaya menjadi Sultan Kacirebonan Awal.⁹ Pertikaian di antara kedua pangeran ini disebabkan oleh keinginan keduanya untuk mewarisi takhta yang ditinggalkan oleh Sultan Sepuh I yang wafat pada tahun 1697. Karena Sultan Sepuh I Martawijaya belum menetapkan penerusnya, baik Pangeran Dipati Anom ataupun Pangeran Adiwijaya, merasa

5. Benteng VOC yang bernama *De Beschermingh* itu kini telah musnah, dan terletak di sekitar Jalan Benteng yang ada di pesisir pantai Cirebon, lihat Molsbergen, *Gedenkboek der gemeente Cheribon, 1906 - 1931*, 9.

6. John Joseph Stockdale, Ira Puspitorini, and An Ismanto, *The Island of Java*, dua. (Yogyakarta: Indoliterasi, 2014), 232.

7. Singgih Tri Sulistiyono, “Dari Lemahwungkuk Hingga Cheribon: Pasang-Surut Perkembangan Kota Cirebon Sampai Awal Abad XX,” in *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), 135.

8. Sharon Joy Siddique, *Relics of the Past? A Sociological Study of the Sultanates of Cirebon, West Java* (Bielefeld: Bielefeld University, 1977), 49.

9. M. Sanggupri Bochari and Wiwi Kuswiah, *Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon*, Ed. 1. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001),

berhak menjadi pengganti Sultan Kraton Kasepuhan yang telah tiada. Walaupun belum terjadi perang terbuka, perselisihan di antara kedua belah pihak begitu tampak di permukaan. Hal itu sangat mengkhawatirkan Permaisuri dari mendiang Sultan Sepuh I, sehingga akhirnya ia mengirim surat ke Batavia dan meminta Kompeni untuk turun tangan menanganinya. Perihal korespondensi ini, terdapat tiga surat yang dapat dipelajari lebih lanjut dalam *Dagh-Register* atau Catatan Harian Kastel Batavia yang bertanggal 15 Juli 1697, 11 Oktober 1697, dan 15 Desember 1698.

Terkait dengan konflik di antara kedua pangeran itu, penulis menemukan sebuah naskah kontrak atau perjanjian yang dibubuhi tanda tangan para penguasa Cirebon dan pejabat VOC, yang ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Perjanjian itu bertanggal 4 Agustus 1699 dan terdiri dari 12 pasal yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut. Penulis tertarik untuk mengulas naskah kontrak ini karena sejumlah hal yang mendasar. *Pertama*, naskah kontrak ini adalah sebuah sumber primer bagi sejarah karena berasal dari masa di mana perjanjian itu dilakukan. Sebagai data valid, naskah kontrak menjadi sumber yang sangat penting bagi penulisan sejarah Cirebon secara khusus, dan sejarah Indonesia pada umumnya. *Kedua*, naskah kontrak ditulis dalam aksara Latin dalam Bahasa Belanda Abad XVII. Karena terdapat banyak perbedaan di antara Bahasa Belanda klasik dan Bahasa Belanda kontemporer, tidak banyak orang yang memiliki penguasaan dan pemahaman atas teks-teks sejarah yang ditulis dalam Bahasa Belanda klasik, bahkan termasuk orang Belanda asli yang hidup pada masa kini. Padahal banyak sumber sejarah Indonesia, khususnya pada periode kolonial, yang ditulis dalam Bahasa Belanda.

Oleh sebab itu, penulis berusaha untuk semaksimal mungkin mengupayakan pengerjaan translasi dan transliterasi Kontrak 4 Agustus 1699. Harapannya, teks-teks di dalamnya dapat lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat, sehingga kandungan perjanjian yang melibatkan para petinggi Cirebon dan VOC pada masa itu menjadi lebih jelas. Di samping itu, isi pasal-pasal yang ada di dalam perjanjian juga akan didialogkan dengan literatur sejarah lainnya. Dengan demikian, pembaca akan mendapatkan pemahaman sejarah Cirebon yang lebih utuh dan komprehensif.

2. Metode Penelitian

Dalam studi ini, peneliti menggunakan metode historis yang didukung dengan studi kepustakaan guna menjawab pelbagai pertanyaan penelitian yang diajukan. Pada tahap heuristik, penulis mendapatkan data Perjanjian 4 Agustus 1699 di Arsip

Nasional Republik Indonesia, pada bundel *Dagh Register* tahun 1699 M. Selain itu, ANRI juga menyimpan data perjanjian lain yang adalah naskah asli pada nomor 38.5 dalam Inventaris Arsip Cirebon (K.7). Sumber sezaman lain juga penulis dapatkan dalam karya-karya yang sudah diterbitkan, seperti tulisan berjudul *Eenige officieele stukken met betrekking tot Tjerbon* yang ditulis oleh J.L.A. Brandes dalam *Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, vol. 37, pada tahun 1894,¹⁰ dan buku yang berjudul *Corpus diplomaticum Neerlando-Indicum: verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van privilegebrieven, aan hen verleend, enz.* karya F.W. Stapel dalam jurnal ilmiah *BKI* atau 'Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlands-Indië'. Selain sumber-sumber tersebut, studi ini juga menggunakan pelbagai artikel jurnal, buku, dan tulisan akademis lainnya sebagai sumber pendukung untuk menarasikan alur dan hasil penelitian.

Dalam proses kritik, data-data yang dihimpun tidak hanya diterjemahkan dan dibaca sekilas saja, namun turut ditelisik baik dari segi internal ataupun eksternal. Pada tahap ini, penulis mencoba menggunakan pendekatan filologis agar sumber primer yang ada bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal itu dilakukan agar sumber yang dijadikan sebagai landasan benar-benar dapat diverifikasi dan valid. Selanjutnya, penulis melakukan interpretasi terhadap data agar bisa melihat konteks perjanjian tersebut dengan alur sejarah yang sebenarnya. Penulis merasa harus berhati-hati dalam proses ini, karena kesalahan terhadap pembacaan dan penafsiran pasal perjanjian, bisa menghasilkan pemahaman yang keliru sehingga bisa membuat kita tidak menangkap sejarah yang sebenarnya. Setelah itu, penelitian ini ditutup dengan proses historiografi yang merupakan langkah terakhir dalam studi sejarah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Deskripsi Naskah

Naskah kontrak bertanggal 4 Agustus 1699 yang dijadikan sebagai sumber kajian ini merupakan bagian dari koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia. Arsip ini disimpan di sana dan diberi kode ID-ANRI K66a, File 2519, Folio 515-523¹¹. Dalam identitas arsip, naskah ini oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, dimasukkan ke dalam "bundel" arsip khusus yang judulnya adalah "*Arsip Gubernur-Jenderal dan*

10. J. Brandes, *Eenige Officiele Stukken Met Betrekking Tot Tjerbon Naar Aanleiding van Het Bijshrift Ij de Pepakem Tjerbon in Ms. Orient*, vol. 37 (Albreeht & Rusche, 1894).

11. Data arsip ini diperoleh secara daring (online), dari situs web <https://sejarah-nusantara.anri.go.id/>, yang merupakan salah satu situs yang dikelola oleh ANRI guna mensosialisasikan pelbagai macam arsip, khususnya arsip kolonial.

Dewan Hindia (Pemerintah Agung) pada VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) dan para pejabat penerusnya, 1612-1812". Himpunan arsip yang ada di dalam "bundel" tersebut, diketahui memiliki volume 500 meter linier, dengan media atau berbahan kertas, dan terdiri dari nomor inventaris 1 sampai 4.631. Keterangan tersebut secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa khazanah arsip yang ada di dalam bundel itu sangat kaya, dan merupakan harta karun berharga yang dapat menjadi bahan kajian sejarah Indonesia yang lebih dalam dan komprehensif.

Berdasarkan karakteristik kertas yang menjadi alas naskah, diketahui bahwa naskah kontrak ini merupakan bagian dari Catatan Harian (*Dagh Register*) Kastel Batavia tahun 1699.¹² Tulisan tangan dalam bahasa Belanda klasik berbunyi "*In 't Casteel Batavia A° 1699, 13 Augusty*" dan "*13: Aug°= In't Casteel Batavia A° 1699:*" yang terdapat pada bagian atas halaman kertas merupakan tanda yang menjadi petunjuk bahwa kontrak ini diambil dari lembaran halaman Catatan Harian Kastel Batavia. Kata 't di atas, merupakan abreviasi kata *het*. Sementara kata singkat A° merujuk pada kata *Anno* yang dapat dimaknai sebagai "tahun". Jadi, naskah ini adalah salinan otentik atas kontrak yang disepakati oleh penguasa Cirebon dengan pejabat VOC pada 4 Agustus 1699. Untuk naskah asli, disimpan di ANRI sebagai dokumen dengan nomor 38.5 dalam Inventaris Arsip Cirebon (K.7). Dalam catatan lain, kontrak ini ditulis dengan kode ALG.SEC.K7.131 dan memiliki judul: "*Verdrag tusschen de Cheribonsche Princen.*" (Perjanjian antara Para Pangeran Cirebon).

Selain yang dimuat dalam *Dagh Register* tahun 1699, kontrak yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak di Kastil Batavia itu pernah dimuat pula dalam tulisan J.L.A. Brandes berjudul "*Eenige officieele stukken met betrekking tot Tjerbon*" yang diterbitkan dalam *Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, vol. 37, pada tahun 1894. F.W. Stapel juga mencantumkan kontrak itu sebagai salah satu perjanjian penting yang dihimpunnya dalam *Corpus diplomaticum Neerlandico-Indicum: verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van privilegebrieven, aan hen verleend, enz.* Kontrak itu tercatat sebagai arsip dengan nomor DCV (605) pada jilid yang keempat. Di

12. *Dagh Register* (yang secara harfiah berarti catatan harian) adalah dokumen tertulis yang dibuat secara rutin setiap hari oleh petugas VOC di Batavia, kota pelabuhan yang menjadi pusat aktivitas VOC di Asia. Pelbagai peristiwa yang dianggap penting dan terjadi di kota itu, mesti dicatat tanpa henti setiap harinya, karena akan menjadi bahan laporan kepada *De Heren Zeventien* (Tuan Tujuh Belas) sebagai para petinggi VOC yang ada di Belanda. Apabila terdapat kejadian besar di Batavia, maka lembaran catatan *Dagh Register* hariannya akan jauh lebih tebal dari biasanya. Menyadari pentingnya dokumen ini untuk sejarah, pemerintah kolonial Hindia Belanda pernah menerbitkannya dengan judul "*Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India*", meski baru sempat sebagian. Yang telah diterbitkan sebagai buku, berasal dari *Dagh Register* tahun 1624 sampai tahun 1682.

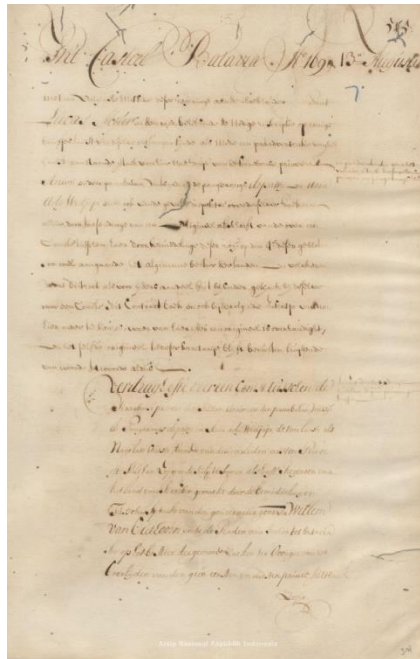
Belanda, kontrak ini juga dimuat dalam *Uit het Contractboek. Ook in de verzameling der Kamer Zeeland no 8148, alsmede in de Overgecomen brieven 1700, eerste boeck, folio 484 en volgende*. Dari semuanya, arsip kontrak yang terdapat dalam *Dagh Register* tahun 1699 merupakan yang paling memungkinkan untuk diakses dan dijadikan sebagai sumber kajian studi ini.

Pada bagian bawah lembar kertas, terdapat beberapa halaman yang memuat masing-masing satu penggal kata yang merupakan petunjuk untuk kata yang paling awal dituliskan dalam lembar kertas selanjutnya. Teks yang ada di dalam naskah, ditulis secara *recto-verso* atau secara bolak-balik di dua sisi lembar halaman. Namun pada bagian pojok atas kanan atau kiri yang menjadi bagian terluar kertas, terdapat tulisan angka-angka, mulai dari nomor 515 sampai 523, yang tampaknya dibuat kemudian oleh petugas arsip. Rangkaian angka tersebut tampaknya merujuk pada nomor folio dari setiap lembaran naskah tersebut. Sistem penomoran yang telah ada ini, menjadi patokan bagi penulis untuk mendeskripsikan naskah. Sudut kanan (*right-hand*) atas menjadi tempat bagi tulisan nomor-nomor halaman dengan angka ganjil (515, 517, 519, 521, dan 523). Sedangkan untuk sudut kiri (*left-hand*) atas ditempati halaman berangka genap (516, 518, 520, 522). Kontrak 4 Agustus 1699 ini ditulis dalam 9 nomor halaman, dengan setiap halamannya terdiri dari sekitar 23-25 baris teks.

Alas kertas teks perjanjian ini adalah kertas-kertas Eropa. Tidak ada *watermark* dan tidak ada juga penanda khusus yang mencirikan bahwa kertas tersebut adalah produksi dari suatu pabrik atau industri kertas tertentu. Namun yang jelas, kertas Eropa ini diimpor oleh VOC dari Belanda karena pada Abad XVII, Amsterdam di Belanda telah mampu menghasilkan kertas yang baik dan bahkan mampu menjual hasil produksinya hingga ke Jerman dan Prancis. Padahal sebelumnya, orang-orang Belanda mengimpor kertas dari kedua negeri itu di samping Swiss dan Genoa.¹³

Kertas naskah kontrak itu berwarna coklat yang mengarah menjadi warna yang abstrak karena berkesan seperti warna kekuning-kuningan. Ukuran kertasnya adalah folio, ukuran yang memang menjadi standar ukuran kertas yang dipakai VOC. Kondisinya cukup baik, walaupun di sejumlah titik kertas terdapat beberapa bolongan yang disebabkan oleh aktivitas serangga. Secara garis besar, teks di dalamnya masih terbaca walaupun di beberapa bagian tintanya tampak semakin memudar.

13. W. A. (William Algernon) Churchill, *Watermarks in Paper in Holland, England, France, Etc. in the XVII and XVIII Centuries and Their Interconnection* (Amsterdam: Amsterdam : M. Hertzberger, 1935), 6.



Gambar 1

Halaman Pertama Kontrak Cirebon-VOC, 4 Agustus 1699

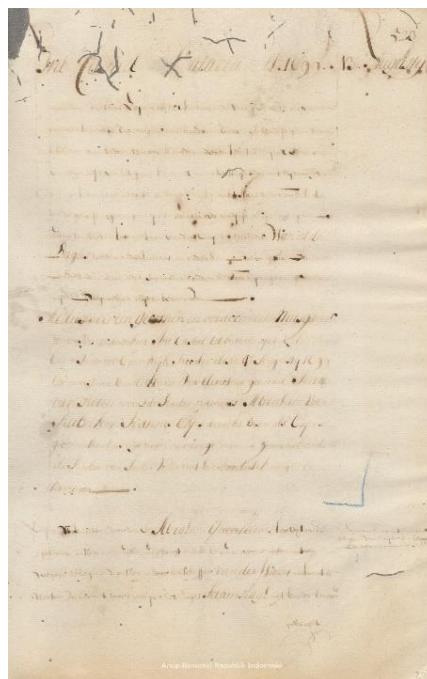
Sumber : Arsip *Dagh Register* Tahun 1699, ANRI

Tinta hitam adalah media yang digunakan untuk menulis di atas alas naskah. Karena usianya yang sudah ratusan tahun, warna hitam itu kini semakin memudar dan cenderung seperti warna coklat. Tingkat kehitaman dan kepuadaran warna tinta, tidak sama pada setiap halamannya. Namun yang paling tidak jelas karena tintanya sudah usang dimakan zaman, terdapat pada halaman folio 521. Selain warna kertas yang telah banyak berubah, warna tinta di bagian naskah juga menjadi bagian yang paling kentara mengalami perubahan. Meski demikian, bisa saja perbedaan tingkat kehitaman tinta disebabkan oleh penggunaan tinta yang berbeda, namun memang cukup sulit untuk mengidentifikasinya. Para petugas VOC membuat tinta dari buah *galnoot* (majakane) karena kandungan besi di dalamnya cukup tinggi.¹⁴

Tinta jenis ini berwarna hitam kecoklat-coklatan atau keungu-unguan karena dan merupakan tinta dengan ramuan berbahan dasar kandungan asam tanat dan garam besi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Walaupun telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, tinta ini masih ada yang memproduksi dan bahkan dijual di pasaran.

14. Louisa Balk et al., *The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta)* (Brill, 2007), 176.

Karena kontrak ini terdapat dalam halaman 515 lembaran *Dagh Register*, maka bagian awal kertas bukanlah kata-kata yang berhubungan langsung dengan perjanjian, melainkan catatan tentang peristiwa yang ada di hari itu. Sekalipun begitu, tampaknya peristiwa yang tengah dicatat dalam lembar itu masih berkaitan dengan konteks kontrak yang diresmikan. Teks paling awal di halaman itu adalah: “*met een originele missive dese regering en den boekhouder en resident Lucas Meur...*” (dengan surat resmi asli dari pemerintah ini kepada akuntan sekaligus residen, Tuan Lucas Meur...). Keterkaitan kalimat ini sangat jelas dengan perjanjian yang terjadi karena pada 1699, Lucas van de Meur tengah menjabat sebagai Residen Cirebon. Dalam sejarah Kompeni, ia dikenal sebagai seorang pedagang (*koopman*). Kepiawannya dalam dunia niaga terekam dalam kegiatan jual beli tanah di selatan Batavia pada tahun 1696. Saat itu, Meur menjual tanah yang kelak menjadi Kota Depok kepada Chastelein seharga 300 R^{ds}.¹⁵ Sementara itu, bagian paling akhir dari halaman 523 berbunyi: “*...het yaght Saamslagt uyt Banda bewo..*” (...sebuah kapal bernama Saamslagt dari Banda...). Kalimat ini tampaknya sudah tidak terkait lagi dengan kontrak Cirebon-VOC 1699 karena konteks peristiwanya sudah berbeda.



Gambar 2

Halaman Terakhir Kontrak Cirebon-VOC, 4 Agustus 1699

Sumber: Arsip *Dagh Register* Tahun 1699, ANRI

15. Frederik De Haan, *Priangan de Preanger-Regentschappen Onder Het Nederlandsch Bestuur Tot 1811* (Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1910), 236.

3.2. Kondisi Cirebon Pada Abad XVII

Pada awal Abad XVII, Cirebon berada di bawah kepemimpinan cicit Sunan Maulana Jati (atau yang dikenal sebagai Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati), yakni Pangeran Mas yang bergelar Panembahan Ratu I. Kekuasaannya berjalan sangat panjang, terbentang sejak tahun 1570 hingga tahun 1647. Karena telah memegang puncak kekuasaan Cirebon sejak usia yang masih sangat muda, periode awal kepemimpinannya tidak berjalan dengan baik. Secara politis, terjadi penurunan yang jelas dalam perkembangan negara. Untung saja, kerajaan-kerajaan kecil di Jawa bagian barat hampir semuanya telah ditundukkan oleh pendahulunya, sehingga Panembahan Ratu dapat mempertahankan kekuasaannya di tengah gejolak yang terjadi di beberapa daerah bawahan Cirebon. Salah satu daerah yang sempat melakukan perlawanan terhadap Cirebon pada saat dipimpin oleh Panembahan Ratu adalah daerah Kuningan. Namun, gerakan itu tidak berjalan lama karena akhirnya dapat dipadamkan Panembahan Ratu dengan bantuan militer yang diberikan oleh daerah-daerah bawahan Cirebon lainnya. Kisah tentang perlawanan Cirebon ini menjadi cerita yang senantiasa dituliskan dalam pelbagai versi *Babad Cirebon* yang tersebar di beberapa skriptorium naskah Cirebon.

Demi kemajuan negara, Panembahan Ratu mencoba untuk meneladani kepemimpinan Sunan Maulana Jati. Pelbagai kebijakan yang pernah diberlakukan oleh leluhurnya, diupayakan oleh Panembahan Ratu untuk dilaksanakan pada periode kekuasaannya. Landasan agama yang senantiasa dipegang oleh Sunan Maulana Jati saat memerintah, menjadikannya sebagai seorang penguasa dengan julukan *Pandita-Ratu*. Panembahan Ratu pun terobsesi dengan gelar itu, namun sayangnya ia tidak dapat berlaku seimbang dan malah lebih condong untuk mengedepankan bidang keagamaan ketimbang politik. Dalam catatan Keraton Kasepuhan, diketahui bahwa Panembahan Ratu lebih banyak bertindak atau berperilaku sebagai ulama ketimbang raja. Jadi, urusan politik, ekonomi, dan militer tidak menjadi prioritas negara, karena pada masa itu fokus pemimpin Cirebon terdapat pada persoalan pengembangan agama.¹⁶ Fokus pemimpin tersebut di satu sisi semakin mempertegas kedudukan Cirebon sebagai pusat pengembangan Agama Islam di Jawa Barat, namun di sisi yang lain membuat pertahanan negara menjadi lemah dan rentan mendapat serangan dari pihak luar.

16. Bochari and Kuswiah, *Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon*, 14.

Pola kepemimpinan Panembahan Ratu yang demikian itu, membuat sejumlah kekuasaan lain yang lebih kuat, mencoba untuk menanamkan pengaruh atas Cirebon. Mataram, yang sejak pendiriannya telah berupaya melakukan ekspansi ke banyak wilayah, adalah kerajaan yang pertama kali berhasil melakukannya dengan cara yang terbilang halus, yakni mengikat Cirebon dengan hubungan kekerabatan. Pada akhir Abad XVI, Panembahan Senapati membantu membangun dan memperkuat tembok yang mengelilingi (pusat) kota Cirebon.¹⁷

Walaupun Senapati Mataram sangat menghormati Cirebon dan menganggap bahwa pembangunan tembok benteng sebagai wujud penghormatannya, namun tindakan itu dapat dianggap sebagai salah satu usaha pertama Mataram dalam mengembangkan ekspansi hegemoninya di wilayah Cirebon. Saat Sultan Agung menjadi pemimpin Mataram pada tahun 1613-1645, ia memiliki *garwi padmi* (permaisuri) seorang putri dari Cirebon, yang tidak lain adalah putri Panembahan Ratu sendiri.¹⁸ Penerus Mataram selanjutnya, Amangkurat I, juga memiliki kebijakan yang sama dengan menikahkan salah seorang putrinya dengan Pangeran Adiningkusuma (yang kelak bergelar Panembahan Girilaya), pemimpin Cirebon pasca pemerintahan Panembahan Ratu.¹⁹ Pernikahan antara anggota bangsawan Cirebon dan Mataram yang terjadi dalam beberapa generasi kepemimpinan tersebut tidak hanya didasari oleh kasih sayang atau cinta demi membangun ikatan kekerabatan semata, namun juga memiliki latar belakang ikatan politis karena Mataram menganggap bahwa Cirebon memiliki garis genealogis kebangsawanan yang kuat dan mempertimbangan posisi geopolitik wilayah Cirebon yang strategis.

Memasuki pertengahan Abad XVII, Mataram semakin berlaku represif terhadap Cirebon yang telah berada di bawah pemerintahan yang baru, yakni Panembahan Girilaya yang menggantikan Panembahan Ratu. Hal itu tampak begitu jelas ketika *Pagarage* berakhir dengan kegagalan.²⁰ Dalam pertempuran yang terjadi di sekitar Laut Tanara itu, sekitar 500 pasukan Cirebon dieksekusi oleh tentara Banten.²¹ Amangkurat I, pemimpin Mataram yang juga merupakan mertua Panembahan

17. Hermanus Johannes de Graaf and Th.G.Th Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram* (Jakarta: Grafiti Press, 1986), 144.

18. Sulistiyono, "Dari Lemahwungkuk Hingga Cheribon: Pasang-Surut Perkembangan Kota Cirebon Sampai Awal Abad XX," 119–120.

19. Uka Tjandrasasmita, "Bandar Cirebon Dalam Jaringan Pasar Dunia," in *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), 208.

20. Peristiwa *Pagarage* adalah penyerangan terhadap Banten oleh Cirebon pada 1650, yang didorong oleh desakan politik yang kuat Mataram atas Cirebon, dalam Lopian A.B and Edi Sedyawati, "Kajian Cirebon dan Kajian Jalur Sutra," in *Cirebon sebagai bandar jalur sutra: kumpulan makalah diskusi ilmiah*, [Ed. 1996]. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), 5.

21. C. Guillot, Hasan Muarif Ambary, and Jacques Dumarçay, *The Sultanate of Banten* (Jakarta: Gramedia Book Pub. Division, 1990), 38.

Girilaya, benar-benar tidak dapat mentolerir kegagalan aliansi Cirebon-Mataram untuk menundukkan Banten tersebut. Oleh karena itu, penguasa Cirebon diminta oleh Amangkurat I untuk menghadap ke Mataram guna mempertanggungjawabkannya. Setelah sampai di sana, Panembahan Girilaya beserta seluruh keluarganya yang turut serta tidak diperkenankan untuk kembali ke Cirebon dan menjadi tahanan politik Mataram. Terkait pengelolaan birokrasi pemerintahan Cirebon, Amangkurat I menginstruksikan para pejabat tinggi dari pesisir yang menjadi kepercayaannya untuk bertugas di sana. Walaupun tetap dihormati dan ditempatkan dalam suatu lokasi yang khusus, nasib Panembahan Girilaya di Mataram tidak begitu baik. Bahkan hidup penguasa Cirebon itu dideskripsikan oleh sumber sezaman VOC dengan sangat memprihatinkan karena dalam *Dagh Register* Kastil Batavia bertanggal 11 Mei 1661 diceritakan bahwa, "Setelah kehilangan semua abadinya, Pangeran Cirebon (yang tidak lain adalah Panembahan Girilaya) hidup sebagai orang biasa di Desa Pajaten (salah satu desa yang ada di Mataram)." Sumber sejarah ini memperlihatkan bagaimana nasib Panembahan Girilaya hidup dalam pengasingan di wilayah Kraton Mataram. Dengan tidak ada lagi *abdi* (bawahan) yang dimiliki, maka ia dapat dipastikan telah kehilangan kekuasaannya dan hal itu dipertegas dengan kalimat "hidup seperti orang biasa" yang memperjelas status Pangeran Cirebon tersebut di masa akhir kehidupannya di Mataram. Meski demikian, ia tidak benar-benar hidup sendiri dalam pengasingan. Beserta kedua putra tertua dan beberapa anggota keluarganya, Pangeran Cirebon hidup di sana hingga wafat pada tahun 1662. Tahun kematiannya itu diperkirakan terjadi pada Oktober 1662.²²

Pasca mangkatnya Panembahan Girilaya, kondisi Cirebon semakin tidak menentu karena terjadi kekosongan kepemimpinan. Bahkan karena persoalan ini, Mataram dapat berlaku seenaknya melakukan perubahan hukum melalui kunjungan Ngabei Martanata yang berada di sana antara 21 November dan 4 Desember 1662 (*Dagh Register*, 1 Januari 1663). Berbanding lurus dengan persoalan politik, pengelolaan pelabuhan juga sepenuhnya berada di tangan orang-orang Mataram, sehingga Cirebon tidak dapat mengambil keuntungan dari kegiatan niaga yang ada. Perubahan yang lebih baik bagi Cirebon, baru terjadi setelah huru-hara politik menghantam ibukota Mataram pada 1676-1677. Serangan Pangeran Trunajaya dari Madura bersama sekutu-sekutunya ke pusat kota, mampu membuat kekuatan militer yang semula diagung-agungkan Amangkurat I menjadi hancur lebur. Orang-orang Cirebon yang ada di sana, diungsikan oleh pasukan Madura ke Kediri atas instruksi

22. H.J. de Graaf, *Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I*, 1987, 167.

Sultan Ageng Tirtayasa²³ yang merupakan sekutu Pangeran Trunajaya. Melalui jalur laut, kedua putra tertua Panembahan Girilaya dibawa ke Banten dan di sana dilantik sebagai Sultan Sepuh I Syamsudin dan Sultan Anom I Badrudin.²⁴

Pengangkatan pemimpin Cirebon yang tidak tunggal, dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa tidak hanya untuk mengakomodir masing-masing keinginan putra Panembahan Girilaya saja, namun juga dilandasi dengan dasar pertimbangan kondisi politik yang lebih memudahkan Banten untuk menanamkan pengaruhnya di Cirebon. Dalam perkembangannya, pelantikan itu menjadi benih perselisihan yang membuat para Pangeran Cirebon terus saling berebut kekuasaan. Bersama dengan pembagian kekuasaan, terjadi pula pembagian dalam hal pengaturan hukum yang ditujukan agar kepentingan bidang hukum ketiga subjek penguasa tidak saling tumpang tindih dan bertabrakan. Dalam aspek ini, muncul lembaga *Jaksa Pepitu* yang menjadi pihak yang bertanggung jawab atas masalah peradilan dan hukum di tengah masyarakat Cirebon.²⁵

Meski orang-orang Banten terus mengawasi Cirebon, pada akhirnya para penguasa kota itu membangun hubungan politik yang lebih erat dengan VOC. Hal itu dapat terjadi karena setelah Kompeni berhasil membantu Mataram memberantas perlawanan yang dilakukan oleh Trunajaya di beberapa tempat di Jawa bagian tengah dan timur, maka konsesi kekuasaan atas Priangan beserta beberapa wilayah pesisir utara Jawa diberikan oleh Mataram kepada VOC. Berturut-turut, Indramayu, Sumedang, dan Rembang memilih untuk berada di bawah protektorat Kompeni. Dengan kondisi itu, kedudukan Cirebon menjadi semakin terdesak dan akhirnya membuat para pangeran Cirebon bermitra dengan VOC. Jelas saja peralihan kiblat dan permintaan dukungan daerah-daerah ke Kompeni itu membuat Banten melemah karena pengaruhnya menjadi semakin terkikis.²⁶ Sekalipun begitu, kendali Kompeni yang lebih efektif atas Cirebon baru terjadi pada tahun-tahun setelahnya, melalui

23. Sultan Ageng Tirtayasa adalah gelar kehormatan yang diraih oleh Pangeran Ratu karena ia berhasil membawa Banten ke masa puncak keemasannya. Meski mendapat gelar Sultan Abul Fath Abdul Fattah dari penguasa Mekah, ia lebih masyhur dengan gelar Sultan Ageng tadi. Kemajuan Banten di era ini tidak hanya terjadi dalam bidang politik, namun juga dalam bidang ekonomi yang menjadikannya sebagai salah satu kota pelabuhan terpenting di Jawa pada masa itu. Baca lebih lanjut dalam Titik Pudjiastuti, *Perang, dagang, persahabatan: surat-surat Sultan Banten* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 277.

24. Siddique, *Relics of the Past?*, 34.

25. Tendi, Djoko Marihandono, and Abdurakhman Abdurakhman, "Between the Influence of Customary, Dutch, and Islamic Law: Jaksa Pepitu and Their Place in Cirebon Sultanate History," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 1 (June 29, 2019): 122.

26. Yoneo Ishii, *The Junk Trade from Southeast Asia: Translations from the Tôsen Fusetsu-Gaki, 1674-1723* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1998), 266–267.

Perjanjian 7 Januari 1681.²⁷ Hubungan itu lantas membuat orientasi kemitraan Cirebon berubah, yang semula berkiblat kepada Kesultanan Banten menjadi kepada Pemerintah VOC di Batavia.

Melalui uraian yang ada dalam bagian ini, dapat diketahui bahwa periode kepemimpinan Panembahan Girilaya menjadi tonggak terpenting bagi munculnya pelbagai macam perubahan yang mendasar di wilayah Cirebon pada Abad XVII, baik itu secara politik maupun ekonomi. Kedudukan Cirebon yang pada masa sebelumnya bersifat mandiri, maka pada saat itu sudah berada di bawah hegemoni kekuatan luar, yang dalam hal ini adalah Mataram. Perkembangan politik Tanah Jawa yang ketika itu berjalan dengan sangat dinamis, mau tidak mau mendorong pemimpin Cirebon untuk mencari perlindungan pada pihak lain yang memiliki armada militer yang lebih kuat. Kedudukan politik yang lemah, membuat kehidupan ekonomi Cirebon tidak mapan dan selalu ditentukan oleh pihak eksternal. Pelbagai keuntungan yang berasal dari hasil kegiatan perdagangan di sejumlah desa dan pelabuhan, menjadi bagian pihak yang lebih berkuasa di atas para Pangeran Cirebon. Sebagai pihak pertama yang berhasil menanamkan hegemoninya, Mataram tampak membentuk Cirebon sebagai salah satu daerah yang menyerupainya,²⁸ sehingga saat *gusti* (penguasa) tanah itu telah beralih pada Banten dan VOC, pelbagai hal yang dikembangkan pada era Mataram tetap dapat hidup dan berkembang karena telah mengakar begitu dalam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Cirebon.

3.3. Konflik Keluarga Keraton Cirebon

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kekuasaan tunggal politik Cirebon berubah setelah Sultan Ageng Tirtayasa melantik putra-putra Panembahan Girilaya menjadi penguasa Cirebon secara bersama-sama pada tahun 1677. Ketika itu, Pangeran Syamsuddin Martawijaya dilantik menjadi Sultan Kasepuhan dan Pangeran Badruddin Kartawijaya dilantik sebagai Sultan Kanoman. Lain halnya dengan Pangeran Wangsakerta, yang juga merupakan putra lainnya dari Panembahan Girilaya. Waktu kedua saudaranya berada di Mataram menemani ayahnya yang harus tinggal di sana, dengan restu Sultan Mataram, Wangsakerta diperbolehkan untuk tetap ada di Cirebon sebagai wakil ayahnya namun tanpa memperoleh

27. Naskah asli kesepakatan ini masih tersimpan dengan baik sebagai Koleksi Arsip Cirebon (K.7) No. 38.3 dan No. 38.4 di Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Baca lebih lanjut dalam Tendi, *Perjanjian Dan Kontrak Sultan-Sultan Pertama Cirebon Dengan Pemerintahan Agung VOC* (Bengkulu: Elite Media Kreazi, 2021), 23.

28. Fernando Merennage Radin, "Peasants and Plantation Economy : The Social Impact of the European Plantation Economy in Cirebon Residency from the Cultivation System to the End of First Decade of the Twentieth Century" (Monash University, 1982), 28.

anugerah gelar sultan.²⁹ Setelah berpisah sekian lama, di tahun 1677 itu ketiganya dapat kembali berkumpul dan ditugaskan oleh penguasa Banten sebagai pengelola wilayah Cirebon yang semula dikuasai oleh Panembahan Girilaya.

Meski kebijakan ini tampak menggembirakan warga Cirebon karena pemimpinya berhasil dibebaskan dari belenggu kekuasaan Mataram dan bahkan dilantik secara resmi sebagai penguasa, namun sebetulnya hal itu merupakan tanda yang menjadi bibit keruntuhan dari Kesultanan Cirebon. Pembagian ini di satu sisi melahirkan persaingan yang selanjutnya berubah menjadi benih-benih perselisihan yang frontal. Di sisi yang lain, Pangeran Wangsakerta yang semula telah menjadi wakil Panembahan Girilaya saat ia ditahan di Mataram, juga memiliki rasa ketidakpuasan tersendiri atas pelantikan itu karena ia merasa bahwa apa yang dilakukannya selama itu sama sekali tidak dihargai sehingga dirinya tidak mendapat anugerah sebagaimana yang didapatkan oleh kedua saudaranya.³⁰ Sekuat apapun para tokoh Cirebon menjaga agar para penguasa tetap menyatu, perpecahan para penguasa tetap terjadi dan bahkan berkembang semakin kritis. Dengan cerdas, Pemerintah VOC melihat celah ini dan kemudian mulai mencoba untuk memasukan pelbagai macam kepentingannya melalui perpecahan para pangeran Cirebon yang notabene merupakan sisi paling rapuh dari kehidupan kraton-kraton tersebut.

VOC mulai menanamkan pengaruh di Cirebon melalui Perjanjian 7 Januari 1681, yang merupakan kesepakatan di antara "*Raja Tiga*" Cirebon dan "*Gurnedur Jeneral*" VOC.³¹ Perjanjian ini adalah "*main gate*" (pintu utama) bagi terlaksananya kesepakatan-kesepakatan lain di antara kedua belah pihak.³² Meski tidak dijelaskan tentang adanya perselisihan di antara masing-masing pangeran, namun sejumlah pasal di dalam perjanjian itu memperlihatkan adanya benih-benih ketidakakuran di antara penguasa Cirebon secara jelas. Sebagai contoh, dalam pasal 1 Perjanjian 7 Januari 1681 yang berbahasa Melayu dalam Aksara Jawi tersebut terdapat bunyi: "... *daripada pihak tuan saudara bersaudara raja2 di Cirebon yang bernama Martawijaya dan Kartawijaya dan Wangsakerta serta semoga kepada anak cucunya akan meneguhkan perdamaian berkasih kasihan bersahabat yang betul tiyada berubah selama-lamanya serta tulus dan ikhlash*".³³ Pasal paling pertama perjanjian itu mengharapkan adanya rasa damai, kasih sayang,

29. Tjandrasasmita, "Bandar Cirebon Dalam Jaringan Pasar Dunia," 167.

30. Tjandrasasmita, "Bandar Cirebon Dalam Jaringan Pasar Dunia," 55-75.

31. Dalam arsip tersebut, Pangeran Martawijaya (Sultan Sĕpuh I), Pangeran Kartawijaya (Sultan Anom I) dan Pangeran Wangsakerta (Panembahan Cirebon), disebut dengan nama "*Raja Tiga*" Cirebon dan Gubernur Jenderal VOC disebut dengan "*Gurnedur Jeneral*".

32. Brandes, *Eenige Officiele Stukken Met Betrekking Tot Tjerbon Naar Aanleiding van Het Bijshrift Ij de Pepakem Tjerbon in Ms. Orient*, 37:468.

33. Tendi, "Surat Perjanjian 7 Januari 1681," 45-46.

persahabatan, yang abadi dengan penuh ketulusan, di antara masing-masing pangeran. Persoalan ini ditekankan kembali dalam pasal-pasal lain setelahnya.

Perjanjian selanjutnya, yaitu Kontrak 4 Desember 1685, juga menyiratkan persoalan yang tidak jauh berbeda, yaitu kesatuan utuh dalam pengelolaan Cirebon oleh ketiga penguasa yang ada. Dalam pasal pertama, perdamaian seolah menjadi tuntutan yang paling pertama disampaikan agar dapat menjadi perhatian dan bisa dijalankan dengan baik oleh para Pangeran Cirebon. Bunyi pasal itu adalah: “... *saprakara ratu katiga sanak kang sampun kocap, ayun patut, urip ing asasanak, dipun mupakat, sarěng-sareng ing asasanak, karana patut sampun dados cawěnga ing nagara puniki, titi.*” (... setelah Raja Tiga Bersaudara sama-sama berikrar, mesti hidup bersama, dengan permufakatan [di antara] masing-masing saudara, sebab [perselisihan] telah menjadi biang kebanggan di negara [Cirebon] ini).³⁴ Melalui pasal ini, Pemerintahan Agung VOC seolah mengingatkan bahwa konflik di antara Tiga Raja Cirebon merupakan hal yang mesti di jauhi karena dapat menjadi penghancur eksistensi negara tersebut.

Pada 8 September 1688, disepakati kembali perjanjian antara Cirebon-Batavia. Perjanjian ini sebetulnya penguat dari perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya, namun tampaknya dibuat menjadi lebih spesifik karena beberapa hal memang menjadi faktor yang memengaruhi keadaan damai di Cirebon. Pada pasal di bagian paling awal, menjelaskan kedudukan masing-masing pangeran tentang siapa yang paling tua sehingga mesti dihormati dan struktur derajat mereka untuk mengelola wilayah Cirebon. Persoalan hukum dan pendapatan juga diatur dalam naskah ini karena VOC menyadari bahwa hal-hal itu dapat menyebabkan terjadinya konflik yang berakibat pada memburuknya kondisi sosio-politik Cirebon.³⁵ Keadaan yang buruk seperti itu, merupakan hal yang sudah seharusnya dihindari, karena tentu akan memengaruhi aktivitas ekonomi sehingga berpotensi mengganggu arus niaga yang dilakukan oleh Kompeni di wilayah tersebut.

Rangkaian perjanjian Cirebon-VOC yang naskah aslinya masih dapat diakses sampai sekarang, memperlihatkan bahwa hubungan persaudaraan yang rentan akan konflik itu menjadi bibit perselisihan yang oleh pihak eksternal mudah untuk dimanfaatkan. Walau tampak seperti penolong untuk memadamkan konflik, Kompeni sebetulnya merengkuh banyak keuntungan dari persoalan itu. Tidak hanya keuntungan berupa proses politik yang khusus, namun juga konsesi ekonomi yang mengakibatkan neraca

34. Tendi, *Perjanjian Dan Kontrak Sultan-Sultan Pertama Cirebon Dengan Pemerintahan Agung VOC*, 69–70.

35. Tendi, *Perjanjian Dan Kontrak Sultan-Sultan Pertama Cirebon Dengan Pemerintahan Agung VOC*, 72–86.

keuangan Kompeni dapat berjalan dengan lancar. Euphoria yang ditawarkan dengan status dari daerah bawahan menjadi sahabat (*van vassalen en onderhorigen tot bondgenoten en vrienden*).³⁶ Terkait bidang politik, perubahan juga terjadi dalam struktur pemerintahan yang ada. Namun sayangnya, hal itu dibiarkan begitu saja sehingga Cirebon yang semula merdeka dapat jatuh ke dalam pelukan kolonialisme perusahaan Belanda.

Meninggalnya salah satu pangeran, tidak lantas membuat Cirebon bertransformasi menjadi daerah yang lebih aman. Kondisi itu malah semakin memperkeruh keadaan, karena masing-masing keturunan merasa berhak atas wilayah yang ditinggalkan. Peristiwa ini menimpa pada keluarga penguasa tertua, yakni Kraton Kasępuhan. Pasca kematian Sultan Sępuh I pada tahun 1697, kedua putra paling berpengaruh saling berkompetisi untuk menjadi penggantinya. Praktis, hal itu membuat keluarga kraton terbelah. Permaisuri mendiang Sultan yang mengkhawatirkan konflik tersebut akhirnya menyampaikan kondisi itu melalui surat-surat diplomatiknya kepada Gubernur Jenderal VOC di Batavia guna mencari solusi permasalahan tersebut. Dalam salah satu suratnya, Ratu Kasępuhan itu memang menyatakan bahwa Pangeran Adiwijaya adalah sosok yang pantas untuk menggantikan ayahnya karena ia dianggap memiliki kecakapan yang lebih ketimbang saudaranya. Namun sayangnya, pejabat Kompeni memiliki pertimbangan lain sehingga akhirnya diajukanlah suatu perundingan yang berakhir dengan kesepakatan di antara para penguasa Cirebon dengan VOC pada tahun 1699.

3.4. Kontrak 1699 dan Peran VOC dalam Resolusi Konflik Cirebon

Perselisihan di antara Pangeran Dipati Anom dan Pangeran Adiwijaya, membuat permaisuri dari mendiang Sultan Sępuh I Syamsudin tidak dapat tidur dengan nyenyak. Kegelisahan tampak terus menghinggapi Sang Ratu karena perseteruan itu dapat saja berkembang menjadi lebih buruk jika masing-masing pihak tidak dapat menahan diri untuk melakukan suatu tindakan yang represif. Menyadari bahwa konflik tersebut dapat melahirkan suatu peristiwa yang menakutkan dalam sejarah Kesultanan Cirebon, maka janda mendiang Sultan Kasępuhan pertama itu mengadukannya kepada Gubernur Jenderal Johannes Camphuys di Batavia melalui surat-surat yang dilayangkannya. Perihal korespondensi yang bersifat politis ini, terdapat tiga surat yang kemudian dimuat oleh petugas VOC dalam *Dagh-Register* atau Catatan Harian Kastel Batavia di tahun 1697 dan 1698. Dua surat pertama, ditulis

36. De Haan, *Priangan de Preanger-Regentschappen Onder Het Nederlandsch Bestuur Tot 1811*, 53.

dalam *Dagh Register* yang bertanggal 15 Juli 1697, dan 11 Oktober 1697. Sementara untuk surat terakhir, dimuat dalam *Dagh Register* yang bertanggal 15 Desember 1698.

Dengan surat itu, pihak VOC menyadari bahwa perselisihan yang terjadi di internal Kasępuhan dapat berkembang menjadi suatu hal serius yang dapat membahayakan kedudukan mereka di Cirebon. Oleh sebab itu, Gubernur Jenderal VOC merasa perlu untuk mengambil langkah yang strategis guna menangani persoalan ini. Setelah berkonsultasi tentang akar permasalahan dan kondisi politik yang ada kepada para pegawai terkait yang memahami persoalan Kesultanan Cirebon, pejabat Batavia itu memanggil kedua pangeran yang berseteru untuk datang ke Kastil Batavia. Di sana dilakukan pertemuan di antara ketiga belah pihak, yang selanjutnya dihiasi dengan pelbagai macam negoisasi. Setelah pembicaraan tentang pelbagai masalah itu selesai, akhirnya VOC merangkumnya dan menuliskannya sebagai suatu kontrak yang mesti dilaksanakan. Kontrak buah perundingan di Batavia yang dimaksud adalah Kontrak Cirebon-VOC pada tahun 1699.

Secara garis besar, kontrak yang terdiri dari 12 pasal tentang pengelolaan wilayah Cirebon pasca kematian Sultan Sępuh I, adalah sebagai berikut:

1. *Pertama*, Panembahan Cirebon (Pangeran Wangsakerta), Pangeran Dipati Anom (Pangeran Jamaludin), dan Pangeran Arya Cirebon (Pangeran Adiwijaya) mesti mengakui Sultan Anom I, sebagai pangeran pertama pasca wafatnya Sultan Sępuh I. Di samping itu, mereka juga mesti mengakui kedudukan masing-masing pangeran sebagai pelaksana kuasa atas tanah Cirebon, tanpa merendahkan derajat atau martabat satu sama lain. Keempat pangeran harus mengelola Cirebon secara bersama-sama dan menjauhi perselisihan yang dapat menjatuhkan mereka.
2. *Kedua*, Para Pangeran Cirebon harus mengakui kontrak pada 7 Januari dan perpanjangannya oleh Komisariss Jacob van Dijk pada 27 Februari 1681, kontrak pada 8 September tahun 1688 yang dimediasi oleh Komisariss Johannes de Hartog, dan keputusan bersama di antara almarhum Sultan Sępuh I, Sultan Anom I, dan Panembahan Cirebon, yang menjanjikan kedudukan terhadap kedua putra Sultan Sępuh I untuk menggantikannya saat ia meninggal. Semua pasal dalam perjanjian-perjanjian itu harus disepakati dan tetap diikuti.
3. *Ketiga*, Berdasarkan landasan kesepakatan sebelumnya, setiap pangeran ini akan tetap melaksanakan kegiatan hukum dan peradilan di wilayah hukum pengadilannya masing-masing. Sampai ada ketetapan lain dari Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia, penyelesaian kasus hukum akan seperti

sebelumnya, dan apabila kasusnya lebih rumit akan diselesaikan dalam suatu forum pengadilan bersama (Jaksa Pepitu) Cirebon. Untuk penanganan reguler kasus hukum, jika tempat utama berhalangan digunakan, maka bisa dilakukan di tempat lain. Sultan Anom memiliki hak khusus dalam menentukan tempat proses peradilan.

4. *Keempat*, Tuntutan dan perselisihan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah masing-masing pangeran tidak dicampuri oleh Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia, karena tampaknya para Pangeran Cirebon telah memiliki suatu ketetapan (hukum) yang sah dan adil. Dalam penanganan hukum, keempatnya berjanji untuk selalu tetap utuh sebagai suatu kesatuan. Pihak Kompeni, bisa saja mengurus perkara hukum itu dengan cermat oleh seorang Komisariss yang memiliki keahlian bahasa dan berpengalaman, namun tentu dengan tetap memerhatikan pelbagai hak pelaku pelanggaran untuk membela diri atas tuntutan.
5. *Kelima*, Ketetapan distribusi hasil pendapatan wilayah Cirebon sebelumnya, tidak akan dirubah sampai pertemuan selanjutnya, sebagaimana tertera dalam kesepakatan antara pangeran melalui mediasi Komisariss Johannes de Hartog pada 8 September tahun 1688.
6. *Keenam*, Seluruh Pangeran Cirebon dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran biaya pemeliharaan garnisun (militer) Kompeni di dalam Benteng de Bescherming, yang setiap bulannya adalah senilai lima puluh tujuh (57) Real Spanyol.
7. *Ketujuh*, Tumenggung Nitipraiya dan Wiratmaka, beserta desa dan rakyat yang berada di bawahan kekuasaannya, yang terdiri dari sekitar 600 *cacah*, akan dibiarkan berjalan secara mandiri sebagai kelompok atau bangsa yang bebas, di bawah supervisi dan perlindungan VOC, sama seperti halnya Kepangeranan Gebang atau kelompok masyarakat lain di Priangan.
8. *Kedelapan*, Di antara Pangeran Dipati dan Pangeran Adiwijaya, dengan pasal perjanjian ini, disetujui bahwa semua wilayah dan rakyat Sultan Sėpuh I akan dibagi secara adil sesuai dengan kebijaksanaan logis, demi terjaganya rasa persaudaraan dan kedamaian. Keduanya tetap terlibat dalam pengelolaan wilayah yang menjadi bagian dari almarhum Sultan Sėpuh I. Guna mencegah terjadinya perselisihan di masing-masing wilayahnya, keduanya harus menjaga dengan baik wilayah bagian mereka. Sementara itu, untuk pembagian harta lepas dan tidak bergerak milik mendiang Sultan Sėpuh, akan diatur dengan persetujuan dan kepuasan bersama di antara Ratu (janda) Sultan, semua pangeran, dan seluruh saudaranya.

9. *Kesembilan*, Adapun informasi dari janda Sultan Sěpuh I bahwa Pangeran Adiwijaya adalah satu-satunya calon penerus sultan yang paling kompetitif, telah ditelaah kembali demi menjaga ikatan kekerabatan yang tulus dan kuat dengan Pangeran Dipati. Klaim warisan tunggal pun akan dibagi dengan adil di antara kedua pangeran, demi menjaga seluruh warisan Sultan Sěpuh.
10. *Kesepuluh*, Pangeran Dipati dan Pangeran Adiwijaya berjanji bahwa semua saudara dan saudari mereka akan mendapat manfaat dari warisan mendiang ayah mereka yang dipegang oleh keduanya. Demi pengurusan seluruh keluarga Kasěpuhan, setiap perwakilan dari desa-desa yang dikuasainya akan dipekerjakan di kraton.
11. *Kesebelas*, Pangeran Dipati dan Pangeran Adiwijaya juga berjanji akan bersungguh-sungguh dalam mengelola *kraton* dan rakyat almarhum ayahnya bersama-sama, sebagaimana dalam pasal 3. Dengan persetujuan bersama, selir dan anak-anak mendiang Sultan Sěpuh I yang derajat kebangsawanannya lebih rendah, akan diberi izin tinggal di (benteng) *kraton*.
12. *Kedua-belas*, Pembagian wilayah dan rakyat yang berada di bawah kekuasaan almarhum Sultan Sěpuh I, sebagaimana pada pasal 8 dan 9, telah disepakati untuk dikonsultasikan bersama ke Batavia. Dalam pertemuan itu, dibuat kesepakatan dan ditandatangani bersama suatu daftar perihal penunjukan (penguasaan) yang diperlukan dari semua desa beserta jumlah atau kekuatan laki-laki yang ada di dalamnya. Daftar juga diberikan kepada seluruh ahli waris almarhum. Dengan pembagian ini, diharapkan tidak timbul kesulitan ke depannya. Seluruh daftar itu telah dilaporkan oleh Pangeran Dipati dan Pangeran Adiwijaya sebagai bagian dari kontrak atau perjanjian, yang ditandatangani pada 23 Juni 1699, di hadapan Kapten Melayu, Wan Abdul Bagus, yang merupakan bawahan Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia, sebagaimana naskah yang telah ditulis dan dilaporkan oleh para Pangeran sebelumnya.

Berdasarkan naskah Kontrak antara Cirebon dan VOC pada tahun 1699, diketahui bahwa VOC memiliki peran yang sangat strategis dalam resolusi konflik para penguasa tertinggi Cirebon. Hal itu dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam proses panjang penyelesaian konflik tersebut, mulai dari melakukan pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa ke Batavia, menyediakan tempat perundingan, mengikutsertakan para pejabatnya untuk menjadi saksi dalam diskusi penyelesaian masalah, dan mengikat pihak yang bersengketa untuk patuh dalam sebuah perjanjian. Keempat peran penting VOC ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, pemanggilan VOC kepada Pangeran Dipati Anom dan Pangeran Adiwijaya sebagai kedua putra dari mendiang Sultan Sĕpuh I yang tengah berkonflik. Kedua pangeran ini adalah putra yang paling berpengaruh dari penguasa Kraton Kasĕpuhan yang telah mangkat, dan masing-masing berambisi untuk menjadi pengganti ayahanda mereka. Untuk meredakan konflik yang ada, pihak VOC mengundang Pangeran Dipati Anom dan Pangeran Adiwijaya ke Batavia untuk merumuskan sebuah solusi yang bisa menyelesaikan konflik di antara mereka.

Kedua, penyediaan tempat perundingan di Batavia. Dalam hal ini, pasal kedua belas perjanjian 4 Agustus 1699 mencatat bahwa, "*Aldus overeengekomen en veracordeert, mitsgaders wedersijds onderteekent in het Casteel tot Batavia op het Eijland groot Java in het Coninkrijk Jaccatra...*" (Dengan demikian disepakati dan disetujui, serta masing-masing ditandatangani di Kastil Batavia di Pulau Jawa Besar di Kerajaan Jakarta). Berdasarkan keterangan ini, diketahui bahwa Kastil VOC di Batavia merupakan tempat berlangsungnya perundingan bagi para penguasa Cirebon yang berselisih memerebutkan kekuasaan yang ditinggalkan Sultan Sĕpuh I.

Ketiga, penyediaan saksi-saksi kompeten dalam pengesahan perundingan. Pihak Kompeni menyadari bahwa perjanjian yang dirundingkan tidak akan berjalan dengan baik apabila dilakukan secara asal-asalan dan tidak disaksikan oleh saksi yang kompeten. Oleh karena itu, VOC mengikutsertakan tokoh-tokoh pejabatnya untuk turut serta dalam penandatanganan kontrak tersebut. Sejumlah sosok penting Kompeni yang hadir dan mengamankan proses perjanjian ini adalah Joan van Hoorn, Abraham van Riebeeck, dan Johannes Cops. Ketiganya merupakan perwakilan khusus yang sengaja disediakan oleh Pemerintah VOC untuk mewakili Gubernur Jenderal Willem van Outhoorn, dan Dewan Hindia (*Raad van Indië*).

Keempat, pengikatan pihak-pihak yang bersengketa untuk patuh dan menaati perjanjian yang telah disepakati. Kontrak yang dibuat pada tanggal 4 Agustus 1699 merupakan kesepakatan di antara para Pangeran Cirebon dan pejabat tinggi VOC Batavia, untuk sama-sama menjaga ketentaraman wilayah Cirebon dengan cara mengatur derajat dan kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing penguasa lokal di Cirebon. Kesepakatan ini bukan hanya hasil perundingan semata, melainkan sebuah ikatan yang berhasil digagas oleh VOC untuk memaksa para pangeran Cirebon untuk taat dan patuh terhadap segala kesepakatan yang telah dirundingkan. Pada pasal terakhir, tercatat bahwa kontrak 4 Agustus 1699, "*...soo beloven en verbinden haar de*

Pangerangs Depattij, en Aria Adijwidjaja bij desen de voorschreven verdeelinge..." ([perjanjian ini] menjadi janji dan mengikat Pangeran Dipati [Anom], dan Pangeran Aria Adiwijaya dengan [perjanjian] pembagian yang ditetapkan).

Bagaimanapun, kepentingan VOC di Cirebon sangat besar, sehingga stabilitas daerah itu menjadi perhatian yang penting bagi para pejabat Kompeni di Batavia. *Rush en orde* daerah merupakan kunci atas kelancaran usaha dan kegiatan ekonomi VOC di Nusantara, sehingga konflik antara Pangeran Dipati dan Pangeran Adiwijaya yang dapat mengganggu keteraturan itu mesti ditangani dengan baik. Dalam kontrak tersebut, tampak bahwa VOC memiliki sejumlah peran penting dalam penanganan konflik Cirebon, yang mana dampaknya tidak hanya mendamaikan para pangeran Cirebon yang bersengketa dalam konflik kekuasaan, akan tetapi turut menjaga ketertiban dan ketenteraman sehingga usaha dagang yang tengah dilakukan oleh Kompeni di wilayah itu tetap stabil dan tidak terganggu.

4. Penutup

Melalui artikel ini diketahui bahwa Kontrak 4 Agustus 1699 merupakan salah satu perjanjian antara Cirebon dan Batavia yang sangat penting karena menjadi jejak filologis tentang peran VOC dalam mengelola stabilitas daerah, yang dalam hal ini adalah wilayah yang dikelola oleh para Pangeran Cirebon pada Abad XVII. Kontrak ini disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia dan memiliki kode ID-ANRI K66a, File 2519, Folio 515-523. Berdasarkan karakteristik kertas yang menjadi alas naskah, diketahui bahwa naskah kontrak ini merupakan bagian dari Catatan Harian (*Dagh Register*) Kastel Batavia tahun 1699. Dalam identitas arsip, naskah ini dimasukkan ke dalam "bundel" arsip khusus yang judulnya adalah "*Arsip Gubernur-Jenderal dan Dewan Hindia (Pemerintah Agung) pada VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) dan para pejabat penerusnya, 1612-1812*".

Latar belakang pembuatan kontrak ini adalah kondisi keamanan Cirebon yang terganggu akibat adanya perselisihan yang terjadi di antara Pangeran Dipati dan Pangeran Adiwijaya yang merupakan putra paling berpengaruh dari mendiang Sultan Sėpuh I Martawijaya. Akar konflik di daerah ini memang telah ada sejak generasi sebelumnya, yaitu sejak Sultan Ageng Tirtayasa melantik putra-putra Panembahan Girilaya menjadi penguasa Cirebon secara bersama-sama pada tahun 1677. Ketidakpuasan yang dihasilkan dalam proses ini, menjadi inspirasi bagi perpecahan lain di Cirebon yang terjadi setelahnya. Dengan kondisi itu, terjadi banyak perjanjian dan kontrak di antara para Pangeran Cirebon dengan VOC agar

perpecahan di sana dapat diminimalisir. Turun tangannya Kompeni dalam penanganan persoalan ini tidaklah gratis, karena mereka memiliki tujuan terselubung yang berorientasi kepada keuntungan materil yang dapat direngkuh dari tanah Cirebon.

Perselisihan di antara Pangeran Dipati Anom dan Pangeran Adiwijaya, membuat keluarga Kraton Kasępuhan menjadi selalu riuh. Permaisuri mendiang Sultan Sępuh I Syamsudin menyadari hal ini sehingga akhirnya menyampaikannya kepada VOC di Batavia. Dengan surat-suratnya itu, akhirnya Kompeni turun tangan dalam menangani konflik kedua pangeran Kraton Kasępuhan, dan menetapkan Kontrak 4 Agustus 1699. Dari perjanjian tersebut, diketahui bahwa VOC memiliki sejumlah peran dalam penyelesaian konflik Cirebon. *Pertama*, peran Kompeni tampak dari usaha mereka untuk mengundang pihak-pihak yang bersengketa ke Batavia guna merundingkannya. *Kedua*, VOC menyediakan tempat perundingan di pusat kekuasaan mereka, yakni Kastil Batavia. *Ketiga*, pihak Kompeni mengikutsertakan para pejabat terbaiknya untuk menjadi saksi dalam proses penyelesaian masalah tersebut. *Keempat*, VOC mengikat seluruh pihak yang bersengketa untuk patuh dan taat terhadap pelbagai kesepakatan yang telah ditetapkan. Ikatan tersebut berbentuk sebuah perjanjian.

Daftar Pustaka

- A.B, Lopian, and Edi Sedyawati. "Kajian Cirebon dan Kajian Jalur Sutra." In *Cirebon sebagai bandar jalur sutra: kumpulan makalah diskusi ilmiah*. [Ed. 1996]. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996.
- Atja. "Menjelang Penetapan Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Cirebon." Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, 1988.
- Balk, Louisa, Frans Van Dijk, Diederick Kortlang, Femme Gaastra, Hendrik Niemeijer, and Pieter Koenders. *The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta)*. Brill, 2007.
- Bochari, M. Sanggupri, and Wiwi Kuswiah. *Sejarah Kerajaan Tradisional Cirebon*. Ed. 1. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001.
- Brandes, J. *Eenige Officiele Stukken Met Betrekking Tot Tjerbon Naar Aanleiding van Het Bijshrift Ij de Pepakem Tjerbon in Ms. Orient*. Vol. 37. Albrecht & Rusche, 1894.
- Churchill, W. A. (William Algernon). *Watermarks in Paper in Holland, England, France, Etc. in the XVII and XVIII Centuries and Their Interconnection*. Amsterdam: Amsterdam : M. Hertzberger, 1935.
- De Haan, Frederik. *Priangan de Preanger-Regentschappen Onder Het Nederlandsch Bestuur Tot 1811*. Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1910.

- Godée Molsbergen, E. C. *Gedenkboek der gemeente Cheribon, 1906 - 1931: door de stadsgemeente Cheribon uitg. t.g.v. het 25-jarig bestaan der gemeente op 1 April 1931*. Bandung-Cirebon: Nix & Co, 1931.
- Guillot, C., Hasan Muarif Ambary, and Jacques Dumarçay. *The Sultanate of Banten*. Jakarta: Gramedia Book Pub. Division, 1990.
- Hermanus Johannes de Graaf, and Th.G.Th Pigeaud. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram*. Jakarta: Grafiti Press, 1986.
- H.J. de Graaf. *Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I*, 1987.
- Ishii, Yoneo. *The Junk Trade from Southeast Asia: Translations from the Tōsen Fusetsu-Gaki, 1674-1723*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1998.
- Merennage Radin, Fernando. "Peasants and Plantation Economy : The Social Impact of the European Plantation Economy in Cirebon Residency from the Cultivation System to the End of First Decade of the Twentieth Century." Monash University, 1982.
- Pudjiastuti, Titik. *Perang, dagang, persahabatan: surat-surat Sultan Banten*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Raffles, Thomas Stamford. *The History of Java*. Translated by Prasetyaningrum Eko, Nuryati Agustin, and Idda Qoryati Mahbubah. 3rd ed. Yogyakarta: Narasi, 2014.
- Siddique, Sharon Joy. *Relics of the Past? A Sociological Study of the Sultanates of Cirebon, West Java*. Bielefeld: Bielefeld University, 1977.
- Stockdale, John Joseph, Ira Puspitorini, and An Ismanto. *The Island of Java*. Dua. Yogyakarta: Indoliterasi, 2014.
- Sulistiyono, Singgih Tri. "Dari Lemahwungkuk Hingga Cheribon: Pasang-Surut Perkembangan Kota Cirebon Sampai Awal Abad XX." In *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996.
- Tendi. *Perjanjian Dan Kontrak Sultan-Sultan Pertama Cirebon Dengan Pemerintahan Agung VOC*. Bengkulu: Elite Media Kreazi, 2021.
- — —. "Surat Perjanjian 7 Januari 1681: Edisi Diplomatik Naskah." *Jurnal Tamaddun* 8, no. 1 (April 16, 2020). <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/article/view/6315>.
- Tendi, Djoko Marihandono, and Abdurakhman Abdurakhman. "Between the Influence of Customary, Dutch, and Islamic Law: Jaksa Pepitu and Their Place in Cirebon Sultanate History." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57, no. 1 (June 29, 2019): 117–142.
- Tjandrasasmita, Uka. "Bandar Cirebon Dalam Jaringan Pasar Dunia." In *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996.